

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Literasi Keuangan menjadi populer dan hangat diperbincangkan. Tidak lain karena kekhawatiran akibat pertumbuhan penduduk serta perkembangan pasar keuangan yang semakin pesat. Kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan diakui sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang berdampak negatif, karena minimnya informasi sehingga dapat menimbulkan dampak negatif (OECD/INFE 2009).

Pengetahuan mengenai literasi keuangan sangatlah penting untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan memiliki kecerdasan *financial* yang baik. Tuntutan masyarakat zaman sekarang makin dinamis, bukan hanya persoalan materi, tapi juga harus bisa menguasai bagaimana praktik tentang perkembangan pasar keuangan guna bersaing secara cerdas. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan mengenai aktivitas keuangan menjadi tepat. Selain itu pengelolaan keuangan yang baik, mampu menyejahterakan hidup individu itu sendiri.

Menurut Jumpstar Coalition (dalam Huston, 2010) mendefinisikan bahwa literasi keuangan dapat terjadi ketika seseorang individu memiliki keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada dalam pencapaian tujuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan dari individu tersebut dalam mengaplikasikan pengelolaan keuangan, baik dalam mendapatkan, dan mengevaluasi informasi yang umumnya diperuntukan dalam pengambilan keputusan dengan melihat konsekuensi yang diterima.

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan wirausaha di Indonesia hanya 20%. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Filipina 27%, Malaysia 66% Thailand 73% dan Singapura sebesar 98%. (Bank Pundi).

Banyak negara telah melakukan penelitian tingkat literasi terkait dengan kebijakan nasional. Di Indonesia sendiri hanya 29,7% masyarakat yang paham literasi keuangan.

Melalui survei nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 67,8% masyarakat telah menggunakan produk dan layanan keuangan dan hanya 29,7% masyarakat yang memahami literasi keuangan. Ini menunjukkan bahwa 67,8% masyarakat hanya mengikuti *trend* untuk menggunakan produk dan jasa keuangan tanpa memiliki pengetahuan dan orientasi yang jelas dalam pencapaian tujuannya (Tirta, dalam seminar nasional literasi keuangan, di Gedung BI Kebon Sirih, JAKPUS – Rabu, 5/10/2017).

Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelatihan peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan, serta mendiskusikan berbagai aspek pengembangan UMKM bersama dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Kurangnya *financial literacy* mengakibatkan buruknya perilaku manajemen keuangan. Pengetahuan keuangan terdiri dari keterampilan keuangan dan penguasaan alat keuangan yang dimiliki. Ida dan Dwinta (2010) menjelaskan ketrampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam perilaku manajemen keuangan, seperti menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, memilih rencana asuransi, dan memanfaatkan layanan kredit merupakan contoh dari ketrampilan keuangan. Sedangkan alat keuangan adalah sarana yang digunakan dalam pembuatan keputusan manajemen keuangan seperti cek, kartu kredit, dan kartu debit.

Permasalahan pokok yang dialami pelaku UMKM sebagian besar dalam penentuan orientasi bisnisnya adalah anggaran. Ditambah lagi karena kurangnya akses ke lembaga keuangan sehingga masyarakat lebih memilih mengelola keuangan mereka secara pribadi dan dengan minimnya bekal pengetahuan mengenai keuangan. Meski 67,8% di tahun 2017 bahwa masyarakat sudah menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, tapi tidak dapat memaksimalkan fungsi dan manfaat dari lembaga keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa mereka bersifat pasif. Demikian dapat menghambat keberhasilan pembangunan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang-punggung ekonomi Indonesia bahkan ASEAN.

“UMKM memegang peran sangat penting bagi perekonomian ASEAN, dimana 96% ASEAN terdiri dari UMKM” ucap Presiden Joko Widodo pada ASEAN *Business Advisory Council (ABAC)* di *Philippine International Convention Center (PICC)*, Manila, Filipina pada tanggal 14 November 2017.

Pada tanggal 29 Agustus di pembukaan Forum Solusi Ekonomi Indonesia, Muliaman D. Hadad yang merupakan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang juga sekaligus anggota dewan komisioner OJK berkata, “UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian negara diseluruh dunia, sehingga sangat perlu diperhatikan”.

Pernyataan tersebut didukung oleh data statistik dari lembaga OJK pada tahun 2017 bahwa, UMKM memberikan kontribusi 57,9% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% dari pekerja nasional sehingga OJK memandang UMKM perlu diberdayakan dan ditingkatkan untuk mendorong perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

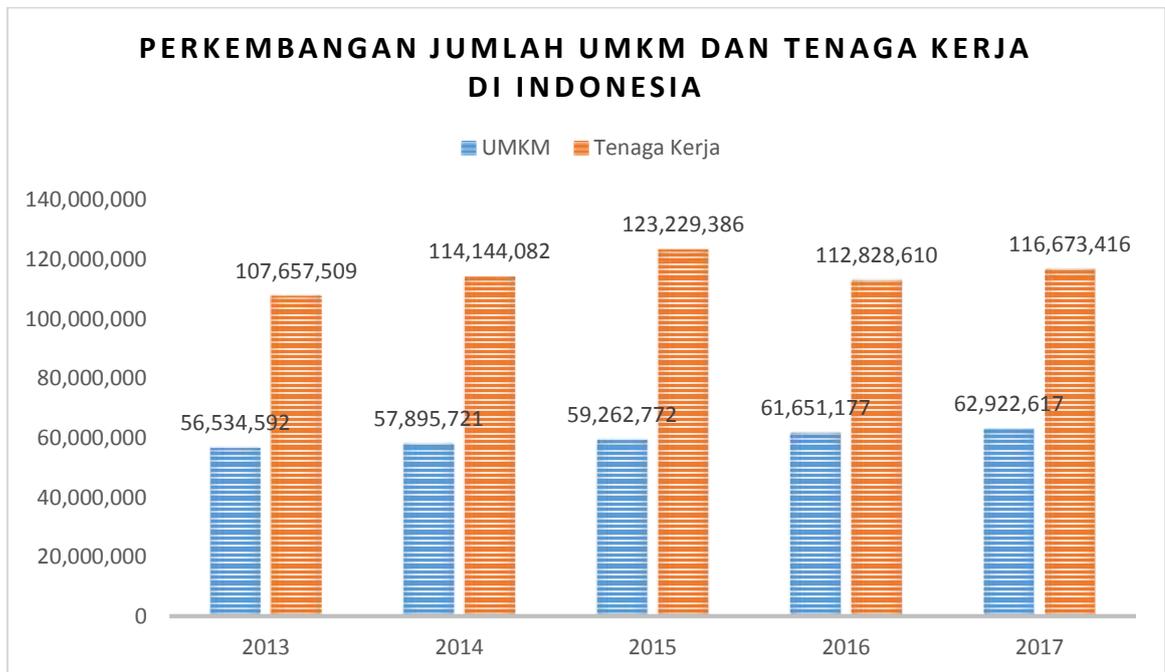
Demikian seyogyanya UMKM harus menjadi handal dan kuat. Pelaku internal adalah kunci utama kesuksesan sebuah usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jeffrey G. Covin dan William J. Wales (2012) berpendapat, bahwa kesuksesan dalam berbisnis memerlukan basis kewirausahaan sebagai daya dorong organisasi. Beberapa orientasi *entrepreneurial* mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk bersikap orientasi belajar inovatif, proaktif, berani mengambil risiko, otonom, dan agresif kompetitif.

Pengembangan jiwa kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha, kemampuan bisnis dan jiwa kepemimpinan dalam sektor UMKM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas operasional UMKM.

Di Indonesia UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa yang tidak dapat dikesampingkan, hal ini dikarenakan UMKM memiliki daya tahan yang kuat dibanding dengan jenis usaha lainnya. Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 hingga krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 (dimuat di Wikipedia

Indonesia), UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap bertahan dalam menghadapi perubahan dunia. Berikut adalah data perkembangan UMKM :



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Indonesia, 2017.

(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro_) (data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah UMKM diiringi dengan penambahan jumlah tenaga kerja, meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10.400.776 pekerja namun mengalami penambahan ditahun berikutnya pada 2017 sebesar 3.844.806. Meningkatnya jumlah UMKM ditiap periode, ini menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM di Indonesia semakin berkembang pesat. Demikian para pelaku usaha UMKM seyogyanya mengerti tentang bagaimana pengelolaan dan menentukan orientasi usaha mereka kedepannya, oleh karena itu literasi keuangan sebenarnya harga mati yang harus dipahami pemilik UMKM agar pengambilan keputusan keuangan dapat dilakukan secara bijaksana (Cahyono, 2012).

Tabel 1.1 Berikut Data UMKM Kota Malang Tahun 2017 Per – Kecamatan Dalam (unit) Dians Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang (data diolah)

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Belum ada Data	Jumlah UMKM
1	Blimbing	-	492	1	2	495
2	Kedung Kandang	-	62	1	-	63
3	Klojen	-	198	1	-	199
4	Lowokwaru	1	28	1	-	30
5	Sukun	-	43	-	-	43
Jumlah		1	824	4	3	830

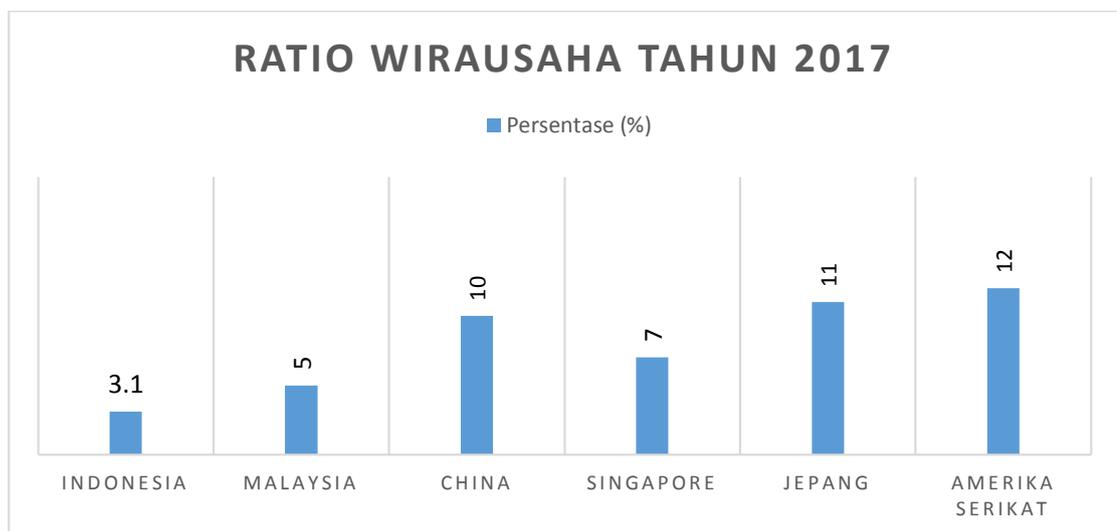
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa data UMKM di wilayah Kota Malang yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro di Kota Malang pada tahun 2017 sangatlah sedikit, hanya berjumlah 1unit di kecamatan Lowokwaru. Jenis usaha kecil dengan jumlah keseluruhan 830 unit, adalah jenis usaha terbanyak yang berada di wilayah Blimbing dengan jumlah unit sebesar 495, sedangkan untuk jenis usaha menengah hanya berjumlah 4 unit dengan masing – masing Kecamatan hanya memiliki 1 unit, kecuali Kecamatan Sukun dan terdapat 2 unit UMKM di Kecamatan Blimbing yang belum memiliki kelengkapan data.

Aktivitas sektor UMKM amat vital dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga cukup luwes dan fleksibel untuk beradaptasi terhadap pasang surutnya permintaan pasar, hal ini dapat dilihat dari UMKM sendiri memberikan kontribusi penting dalam perdagangan. Peranan UMKM di Kota Malang telah menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan sebagian sumber penghidupan penduduk Kota Malang bergantung pada sektor UMKM. Kebanyakan usaha kecil terkonsentrasi pada wilayah pariwisata yang menjadi sasaran para wisatawan, dengan jenis yang ditawarkan berupa kuliner, perdagangan, dan olahan pangan.

Berdasarkan survei Raharjo dan Wirjono (2012) dalam pengelolaan keuangan UMKM hanya 51% yang melakukan pencatatan keuangan, dan yang menghasilkan laporan sesuai dengan kebutuhan kreditor hanya 15,5%. Kecilnya prosentase UMKM yang melakukan pencatatan pembukuannya sehingga sulit mendapatkan laporan yang sesuai dikarenakan mereka tidak terbiasa melakukan pencatatan dan mereka tidak begitu paham dengan bentuk pelaporan yang diinginkan kreditor.

Salah satu faktor penyebab tidak adanya laporan keuangan yang bersifat akurat dan sesuai dengan standard yang ada, bukan hanya karena tidak terbiasa, tapi juga karena minimnya jiwa kewirausahaan yang ada pada tiap individu pelaku UMKM. Mayoritas mereka didominasi oleh rasa takut akan risiko dan kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan serta mengakses lembaga keuangan. Sehingga mereka cukup sulit atau dapat dikatakan sangat terbatas untuk memperoleh dana dari pihak kreditor atau dari para investor.

Sosiolog David McClelland dari *Harvard* dalam bukunya “*The Achieving Society*” (*Van Nostrand*, 1961), menulis bahwa suatu negara bisa menjadi makmur apabila ada *entrepreneur* sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. Berikut ini data persentase ratio wirausaha di beberapa negara ;



Gambar 1.2 Ratio Wirausaha di Dunia (Berita Harian Kompas, 2017)

Jumlah wirausaha di Indonesia di tahun 2017 sebanyak 3,1 persen atau 81.840 juta dari total jumlah 264 juta penduduk.

Kemajuan ekonomi yang luar biasa dari berbagai Negara yang telah mapan disebabkan oleh inovasi kewirausahaan, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa UMKM memiliki porsi dan peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Melalui media UMKM adalah salah satu *action* nyata dari perwujudan kewirausahaan. Semakin banyak kewirausahaan dimiliki oleh sebuah negara, semakin makmur negara tersebut. Menciptakan sebanyak mungkin seorang wirausahawan di suatu negara jelas memiliki kaitan dengan kesejahteraan bangsanya sendiri, setidaknya ada empat alasan;

Solusi bagi dirinya sendiri, solusi bagi sesamanya, solusi bagi komunitasnya, dan solusi bagi negara.

Hubungan jiwa kewirausahaan UMKM dengan literasi keuangan serta perilaku keuangan, menjadi salah satu paket yang berkesinambungan dan memiliki hubungan yang berantai, seperti yang sudah paparkan pada penjelasan sebelumnya.

UMKM merupakan suatu usaha yang dimana merupakan bentuk kegiatan yang sedang dikembangkan disetiap daerah. Kota Malang sudah memiliki banyak tempat dimana pusat UMKM didirikan, salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM adalah menurunnya tingkat penjualan yang sangat drastis, dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Beberapa akhir ini memang terjadi kelesuan ekonomi dunia yang juga berimbas pada Indonesia, ditambah lagi nilai tukar (Rp) terhadap Amerika Serikat (USD) makin memburuk. Dalam situasi demikian para pelaku UMKM merasa terjebak dengan kondisi ini, sehingga beberapa UMKM mengalami kebangkrutan dan berujung gulung tikar. Dikarenakan tidak memiliki dana simpanan yang cukup untuk bertahan serta untuk melakukan ekspansi usaha agar menambah pundi – pundi penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap jiwa kewirausahaan pelaku UMKM di Kota Malang.

Dari beberapa penelitian terdahulu hanya membahas mengenai literasi keuangan pada pelaku UMKM yang berdasarka pada gender, tingkat pendidikan, dan usia. Dapat dikatakan penelitian ini masih bersifat baru, dikarenakan belum ada penelitian yang berkorelasi dengan perilaku keuangan dan jiwa kewirausahaan pelaku UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap jiwa kewirausahaan pemilik UMKM?
2. Bagaimana pengaruh perilaku keuangan pemilik UMKM terhadap jiwa kewirausahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Meneliti sejauh mana tingkat literasi keuangan pelaku usaha terhadap jiwa kewirausahaan UMKM
2. Meneliti sejauh mana tingkat perilaku keuangan pelaku usaha terhadap jiwa kewirausahaan UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk lembaga pemerintahan dan perbankan, sebagai referensi agar lebih giat dalam mengedukasi masyarakat mengenai teori dan praktik keuangan, juga dapat membantu dalam penyediaan modal bagi pelaku UMKM.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman mengenai literasi keuangan dan lebih cerdas dalam perilaku keuangan.